LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke : 8 (delapan)

Masa Persidangan : I

Tahun Sidang : 2024 – 2025

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri R.I.

Hari, Tanggal : Kamis, 5 September 2024

Pukul : 09.00 WIB Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : 1. H. Teuku Riefky Harsya, MT., Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan

dilanjutkan oleh

2. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan. Jenderal

Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Pembahasan RKA Kemlu Tahun Anggaran (TA) 2025

Hadir : 1. dari 49 Anggota Komisi I DPR RI

2. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi, beserta jajaran.

I. <u>PENDAHULUAN</u>

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 276, Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 09.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI pada hari Kamis, tanggal 5 September 2025 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh H. Teuku Riefky Harsya, MT., Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri terkait Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2025 sebagaimana Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 yaitu sebesar Rp9.896.588.491.000,- (sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7.758.191.822.000,- (tujuh triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah):
- b. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional sebesar Rp15.018.468.000,- (lima belas miliar delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik sebesar Rp288.216.336.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- d. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral sebesar Rp1.055.968.167.000,- (satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penyampaian permohonan tambahan anggaran Kementerian Luar Negeri pada tahun 2025 sebesar 4.081.070.964.000,- (empat triliun delapan puluh satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:
 - a. Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional sebesar Rp1.125.656.847.000,- (satu triliun seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral sebesar Rp25.608.058.000,- (dua puluh lima miliar enam ratus delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional sebesar Rp14.819.388.000,- (empat belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik sebesar Rp15.828.385.000,- (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.899.158.286.000,- (dua triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 3. Selanjutnya, terkait kesimpulan poin 1 dan 2, Komisi I DPR RI akan meneruskan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 10.24 WIB.

MENTERI LUAR NEGERI R.I.

Jakarta, 5 September 2024 **KETUA RAPAT,**

RETNO L.P MARSUDI

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, MT A-522